

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pendidikan dalam kehidupan masyarakat sangat penting. Menurut Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan pentingnya pendidikan, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan pemerintah mengusahakan untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), penyelenggara pendidikan tinggi nasional yang berlaku di Indonesia dilakukan oleh pemerintah.

Pendidikan memiliki peran penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang handal. Penyedia jasa (*service provider*) pendidikan memiliki kewajiban untuk menciptakan manusia berkualitas melalui suatu proses pendidikan secara efektif. Secara umum, penyedia jasa pendidikan di Indonesia terdiri dari dua macam jasa yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Penyedia jasa pendidikan dikategorikan menurut

tujuan penyedia jasa dan bersifat nirlaba. Jasa pendidikan tertinggi terdiri dari pendidikan akademik dan pendidikan profesi, sedangkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.

Kebutuhan jasa pendidikan tinggi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan kapasitas jasa pendidikan tinggi yang diselenggarakan pemerintah tidak lagi mampu menerima seluruh calon peserta didik. Hal ini mendapat respon kelompok masyarakat yang lain melalui penawaran jasa pendidikan dengan perguruan tinggi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1998 sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis global turut memicu meningkatnya intensitas dalam persaingan antar penyedia jasa pendidikan tinggi, sehingga masing-masing penyedia jasa akan berusaha menawarkan jasa pendidikan tinggi yang berkinerja tinggi.

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) memiliki karakteristik yang sedikit berbeda, khususnya dalam pengadaan dan pengelolaan aspek dana dibanding dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berimplikasi luas pada optimalisasi sumber daya manusia maupun aspek perangkat dan aspek proses. Sehingga upaya penciptaan kualitas lulusan harus sejauh mungkin direncanakan berdasarkan skala prioritas. Maka sehubungan dengan itu memikirkan upaya optimalisasi variabel vital dengan strategi yang tepat, dengan mempertimbangkan konsep normatif maupun konsep teknis adalah langkah penting untuk pengayaan kualitas manajemen pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi Swasta (PTS), selaras dengan

karakteristik dan fungsi dalam beberapa waktu terakhir ini telah mentaskan diri sebagai jasa usaha, pendidikan tinggi mempunyai pelanggan yang harus dilayani dengan pelayanan jasa yang bermutu.

Dalam jangka panjang, mutu merupakan hal terpenting bagi lembaga pendidikan. Mutu dapat diartikan sebagai “*conformance to requirements*” (pemenuhan terhadap persyaratan) maupun sebagai “*Fitness for use*” kesiapan untuk digunakan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 1999 tentang perguruan tinggi, pengertian mutu perguruan tinggi adalah keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran yang merupakan tanggung jawab institusional perguruan tinggi masing-masing (pasal 128 ayat 2). Penjelasan pasal tersebut terdiri atas efektifitas, efisien, produktivitas, akuntabilitas, suasana akademik dan katahanan sistem.

Persaingan antar perguruan tinggi saat ini sangat ketat, untuk itu berbagai hal yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menjadi perguruan tinggi nomor satu. Perguruan tinggi adalah salah satu instrument pendidikan nasional yang diharapkan dapat menjadi pusat penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi serta pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian bermasyarakat dan bernegara. Perguruan tinggi dapat diposisikan memiliki daya saing ketika suatu perguruan tinggi telah memenuhi indikator-indikator pencapaian tertentu yang dimulai dari input, proses, dan output terhadap pengamalan nilai-nilai Tri Darma Perguruan Tinggi. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis global turut memicu meningkatnya intensitas persaingan antar penyedia jasa pendidikan tinggi, sehingga masing-masing

penyedia jasa pendidikan tinggi akan berusaha menawarkan jasa pendidikan tinggi yang berkinerja tinggi.

Daya saing merupakan efisiensi dan efektifitas yang memiliki sasaran yang tepat dalam menentukan arah dan hasil sasaran yang tepat dalam menentukan arah dan hasil sasaran yang ingin dicapai meliputi tujuan akhir proses pencapaian akhir dalam menghadapi persaingan (Masrur, 2011)

“Kata daya saing dalam kalimat daya saing bermakana kekuatan dan kata saing berarti mencapai lebih dari yang lain, atau berbeda yang lain dari segi mutu atau memiliki keunggulan tertentu. Artinya daya saing dapat bermakna kekuatan untuk berusaha menjadi lebih baik dari yang lain atau unggul dalam hal tertentu baik yang dilakukan seseorang kelompok maupun institut tertentu.” (Sumiharjo dalam Masrur,2011)

Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adanya upaya peningkatan mutu pada perguruan tinggi swasta akan menghasilkan kekuatan atau keunggulan tertentu dari segi mutu sehingga lebih baik dari perguruan tinggi swasta lainnya.

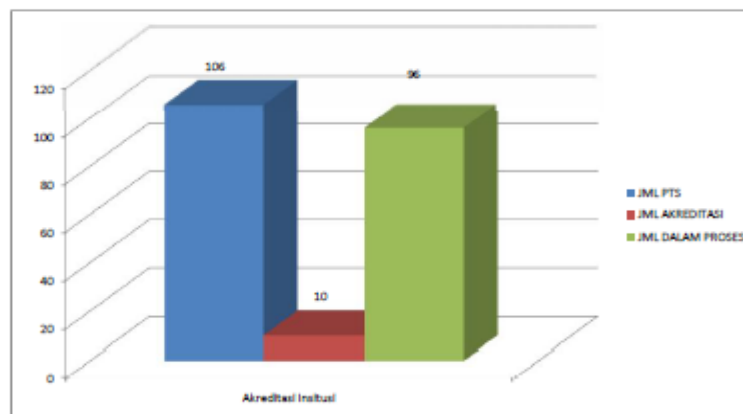
Tabel 1.1

Berikut ini adalah data akreditasi jumlah perguruan tinggi swasta yang di dapat dari lingkungan Wilayah Kopertis V Yogyakarta

**AKREDITASI INSTITUSI PTS AKTIF
KOPERTIS WILAYAH V DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PTS	JML PTS	Status Akreditasi				
		Masih Berlaku			JML MB	JML dalam Proses
		A	B	C		
Universitas	17	2	3	0	5	12
Institut	4	0	1	0	1	3
Sekolah Tinggi	37	0	3	1	4	33
Akademi	41	0	0	0	0	41
Politeknik	7	0	0	0	0	7
Jumlah Total	106	2	7	1	10	96

Keterangan :
Kondisi Per 30 Agustus 2014
A : Akreditasi A
B : Akreditasi B
C : Akreditasi C
MB : Masih Berlaku



Sumber : www.kopertisVyogyakarta.go.id

Persaingan yang demikian ketat tersebut berdampak pada makin sulitnya perguruan tinggi untuk mempertahankan jumlah mahasiswa yang terdaftar maupun perolehan mahasiswa setiap tahunnya. Persaingan digambarkan sebagai suatu siklus perusahaan yang ditentukan oleh empat komponen persaingan (4C) yaitu *Company*, *Costumers*, *Competitor*, dan *Change* (Kotler, 2003). Bagi penyedia jasa pendidikan tinggi swasta, pelanggan yang langsung menikmati jasa yang ditawarkan adalah mahasiswa, pesaing adalah penyedia jasa pendidikan sejenis pada jenjang yang sama, dan perubahan meliputi segala bentuk perubahan

sebagai inisiatif internal maupun eksternal, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik.

Perguruan tinggi swasta harus menerapkan sudut pemikiran baru yang mengandung unsur fleksibilitas, kecepatan, inovasi dan integrasi. Unsur tersebut sangat memerlukan sumber daya manusia yang penuh dengan kreatif. Kreativitas dapat muncul dari sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan. Dengan demikian, PTS diharapkan mampu mengembangkan dua hal yang terkandung dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu meneliti dengan hasil riset yang berkualitas tinggi dan mengembangkan teknologi guna pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu PTS diharuskan selalu mampu beradaptasi, berkembang dan melakukan perbaikan melalui pembelajaran organisasi. Pembelajaran organisasi yang dilakukan PTS akan menciptakan kompetensi inti dan strategi guna membantu kesuksesan.

Ferdinand (2000), keunggulan bersaing adalah sesuatu yang dicari oleh setiap perusahaan bahkan setiap produk dalam pasar yang dimasukinya. Untuk meningkatkan mutu guna menciptakan daya saing perguruan tinggi guna mewujudkan kinerja yang baik maka diperlukan akreditasi bagi program studi yang ada. Akreditasi bagi program studi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan hasil

standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian salah satu tujuan dan manfaat program studi adalah mendorong program studi atau perguruan tinggi terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.

Good University Governance (GUG) merupakan turunan dari konsep *Good Corporate Governance (GCG)*. *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Universitas merupakan organisasi nirlaba yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*), namun harus tetap mendapatkan keuntungan dari pemasukan (*surplus*) karena universitas juga harus bisa menghidupi dirinya sendiri dan dapat mengembangkan kelembagaannya dengan baik, sehingga dapat tetap bertahan untuk kelangsungan hidupnya (prinsip *going concern*). GUG sangat berguna sebagai sistem untuk mengatur tata kelola universitas dengan baik termasuk bagaimana keuntungan tersebut dapat dikelola dengan baik secara profesional, dan menghindari terjadinya kecurangan (*fraud*) dari berbagai konflik kepentingan di dalamnya, sehingga nantinya setiap universitas akan dikelola dengan baik. Di Indonesia sudah ada *Good University Governance (GUG)* untuk universitas/institut badan hukum milik negara, sehingga belum adanya *Good University Governance (GUG)* untuk universitas swasta.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh *Good University Governance* Terhadap Kinerja**

Perguruan Tinggi Swasta Dengan Pendekatan *Balance Scorecard* Di Wilayah V Yogyakarta”

B. Batasan Masalah

Karena jumlah Perguruan Tinggi Swasta di Kopertis V Yogyakarta sebanyak 106 Perguruan Tinggi, maka peneliti hanya meneliti Perguruan Tinggi yang terakreditasi A, dan diwakili oleh Dekan, Wakil Dekan dan Kaprodi perguruan Tinggi tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh daya saing terhadap kinerja Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta di Kopertis V Yogyakarta?
2. Apakah ada pengaruh *Good Univercity Governance* terhadap kinerja Perguruan Tinggi Swasta di Kopertis V Yogyakarta?

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mencari bukti empiris antara daya saing terhadap kinerja Perguruan Tinggi Swasta di Kopertis V Yogyakarta.
2. Untuk mencari bukti empiris antara *Good Univercity Governance* terhadap kinerja Perguruan Tinggi di Kopertis V Yogyakarta.

E. Tujuan Penelitian

a. Manfaat Praktis

- 1) Bagi kopertis V Yogyakarta

Sebagai bahan pertimbangan keputusan bagi Kopertis V terkait kinerja Perguruan Tinggi Swasta.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan terhadap kinerja Perguruan Tinggi Swasta.

3) Bagi masyarakat

Sebagai pertimbangan dalam memilih Perguruan Tinggi Swasta.

b. Manfaat Teoritis

1) Untuk bahan pengembangan mata kuliah manajemen Strategik di Perguruan Tinggi Swasta tersebut.

2) Sebagai bahan pertimbangan/pengembangan mata kuliah manajemen kinerja bagi Perguruan Tinggi Swasta Tersebut.